

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN**

TESIS

**Oleh :
Muhammad Radhia Wardana
190211050111**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
2022**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN

TESIS

**Diajukan Kepada universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Keluarga**

**Oleh :
Muhammad Radhia Wardana
190211050111**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
POGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Radhia Wardana

NIM : 190211050111

Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 30 Maret 1983

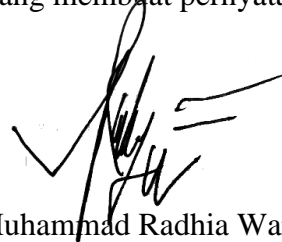
Program Studi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 07 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Radhia Wardana

PERSETUJUAN TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN**

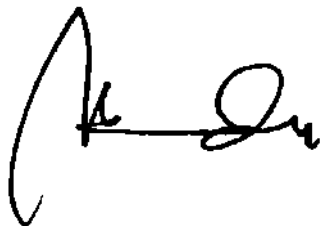
Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

Muhammad Radhia Wardana

190211050111

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

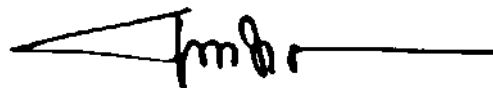
Pembimbing I



Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H.

Tanggal, 09 Maret 2022

Pembimbing II



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

Tanggal, 10 Maret 2022

PENGESAHAN TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCELAIAN**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH :

Muhammad Radhia Wardana

190211050111

Telah diajukan pada Dewan penguji

Pada: hari Rabu, Tanggal 23 Maret 2022

Dewan Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. M. Rusydi, M.Ag.
(Ketua)

1.

2. Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H.
(Anggota)

2.

3. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
(Anggota)

3.

4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.
(Anggota)

4.



Mengetahui,
Direktur

[Signature]
Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd
NIP. 197105251997031006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karuniaNya yang tidak terhingga, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., kepada keluarga dan para sahabat beliau sampai akhir zaman. Berkat rahmat dan kasih sayang yang diberikan Allah SWT. akhirnya saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian”.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Saya menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini disebabkan karena kemampuan dan pengetahuan saya yang masih terbatas. Namun saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik agar tesis ini dapat segera diselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya bersedia menerima masukan, saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama para bimbingan yang telah memberikan arahan dan masukan, dukungan serta motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih saya

persembahkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd. sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah menerima tesis ini hingga menyetujuinya untuk dimunaqasyahkan.
2. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H. sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H. sebagai Dosen Pembimbing I dan Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, masukan dan motivasi kepada saya dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
4. Seluruh Dosen Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga kepada saya.
5. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada saya selama menempuh studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
6. Kepada Orang tua tersayang, isteri tercinta dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril, materiil, serta motivasi dan doa dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada semua teman dan sahabat mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang senantiasa memberikan bantuan moril, dukungan semangat serta motivasi dan

doa dalam menyelesaikan tesis ini.

8. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan, dan saran kepada saya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Hanya ucapan terima kasih yang tak terhingga yang dapat saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya. Semoga bantuan dan doa kepada saya dapat menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah SWT. Akhirnya, mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi saya khususnya, bagi pembaca pada umumnya, dan bagi peneliti baru yang berminat meneliti lebih dalam lagi pada permasalahan yang serupa. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabb al-A'lam.

Banjarmasin, 10 Maret 2022



Muhammad Radhia Wardana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Definisi Operasional	16
F. Penelitian Terdahulu	21
G. Kajian Teoritis	27
H. Metode Penelitian	37
I. Sistematika Penulisan	45
BAB II	47
HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN YANG DIATUR DALAM HUKUM ISLAM DAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	47
A. Hak-Hak Perempuan Pasceperceraian Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan	54
1. Hak Pelunasan Atas Kewajiban Mahar yang Masih Terutang Atau Belum Dibayar	54
2. Hak Untuk Diberikan Mut'ah Setelah Bercerai	63

3. Hak Untuk Memperoleh Nafkah Atau Biaya Penghidupan Selama Masa Iddah	70
4. Hak Untuk Pembayaran Nafkah Madiyah (Nafkah Terutang) Yang Telah Dilalaikan Atau Tidak Diberikan Oleh Suaminya Sebelum Bercerai	78
5. Hak Untuk Memperoleh Bagian Dari Harta Bersama Selama Masa Perkawinan	82
6. Hak Atas Pengasuhan Anak Yang Berusia Kurang Dari 12 (Dua Belas) Tahun	86
B. Hak-Hak Anak Pasceperceraian Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan	94
1. Hak Untuk Mendapatkan Biaya Penghidupan Yang Layak	97
2. Hak Untuk Mendapatkan Kasih Sayang Dari Kedua Orang Tuanya	103
3. Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Yang Layak	106
4. Hak Untuk Tumbuh Dan Berkembang Sesuai Dengan Bakat Dan Minatnya	111
BAB III	115
BENTUK PERLINDINGAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN ATAS PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN MELALUI LEMBAGA PERADILAN	115
A. Jaminan Perlindungan Atas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasceperceraian Melalui Lembaga Peradilan Agama	115
B. Upaya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Dalam Memberikan Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasceperceraian	145
BAB IV	160
ANALISIS TENTANG JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN	160

A. Kedudukan Perempuan dan Anak Dalam Negara Hukum	160
B. Eksistensi dan Peran Lembaga Peradilan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	174
C. Membangun Sistem Lembaga Peradilan yang Mampu Melindungi Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian	187
BAB V	211
PENUTUP	211
A. Kesimpulan	211
B. Saran	213
DAFTAR PUSTAKA	215
LAMPIRAN	220
Terjemah Teks Arab (ayat al-Qur'an dan Hadis)	220
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	227

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Trasliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1	ا	:	A	16	ط	:	Th
2	ب	:	B	17	ظ	:	Zh
3	ت	:	T	18	ع	:	'
4	ث	:	Ts	19	غ	:	Gh
5	ج	:	J	20	ف	:	F
6	ح	:	<u>H</u>	21	ق	:	Q
7	خ	:	Kh	22	ك	:	K
8	د	:	D	23	ل	:	L
9	ذ	:	Dz	24	م	:	M
10	ر	:	R	25	ن	:	N
11	ز	:	Z	26	و	:	W
12	س	:	S	27	ه	:	H
13	ش	:	Sy	28	ء	:	'
14	ص	:	Sh	29	ي	:	Y
15	ض	:	Dh				

Mad dan Diftong :

- | | | | | | |
|--------------------|---|-------|-------|---|----|
| 1. Fathah panjang | : | Â / â | 4. أو | : | Aw |
| 2. Kasrah panjang | : | Î / î | 5. أي | : | Ay |
| 3. Dhammah panjang | : | Û / û | | | |

Catatan :

1. Konsonan yang bersyaddad ditulis dengan rangkap
Misalnya : ربنا ditulis *rabbânâ*
2. Vokal panjang (mad)
Fathah (baris di atas) ditulis â, kasrah (baris di bawah) ditulis î, serta dammah (baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya; القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
3. Kata sandang alif + lam (ال)
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya ; الكافرون ditulis *alkâfirûn*. Sedangkan bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya ; الرجال ditulis *ar-rijâl*.
4. Ta' marbûthah (ة)
Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya : البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t, misalnya : زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat al-Nisâ`*.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

ABSTRAK

Muhammad Radhia Wardana: *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian*, di bawah bimbingan I : Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H., II. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-Hak Perempuan dan Anak, Pascaperceraian

Hal yang cukup memprihatinkan dari tingginya angka perceraian di Negara Republik Indonesia adalah seringkali terabaikannya hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Pihak perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan dan sangat memerlukan perlindungan hukum dari negara, karena perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering menjadi korban dan merasakan dampak negatif dari sebuah perceraian. Bahkan kenyataannya, perempuan dan anak seringkali berada dalam posisi yang lemah dan tidak berdaya, sehingga tidak dapat memperjuangkan bahkan memperoleh hak-hak mereka yang terabaikan akibat terjadinya perceraian. Padahal Secara normatif, hukum Islam telah memberikan jaminan tentang adanya hak-hak perempuan dan anak yang harus dipenuhi setelah terjadinya perceraian. Di sisi lain, secara yuridis hak-hak tersebut juga diakui oleh hukum negara dan mendapatkan jaminan perlindungan melalui berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, ketidakberdayaan pihak perempuan dan anak dalam memperjuangkan hak-hak mereka akibat terjadinya perceraian harus menjadi perhatian yang serius dalam penegakan hukum di negara kita. Perempuan dan anak sudah seharusnya mendapatkan perlindungan yang selayaknya dari negara melalui instrument dan penegakan hukum yang berkeadilan. Negara harus hadir untuk melindungi keduanya agar hak-hak mereka dapat terpenuhi, khususnya berkaitan dengan hak-hak mereka pascaperceraian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), atau biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pada sisi lain, penelitian ini juga memerlukan pendekatan konseptual berdasarkan hukum Islam, yaitu mengacu pada konsep dan ketentuan yang dirumuskan dalam hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data (bahan hukum) dilakukan dengan menggunakan cara dokumentasi. Kemudian Penulis akan mengkaji dan menganalisa segala ketentuan hukum tentang pokok permasalahan menurut hukum Islam (secara normatif) serta menurut peraturan perundang-undangan (secara yuridis), sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum dan keadilan sangat diperlukan bahkan memainkan peran yang sangat penting dan strategis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Peran lembaga peradilan melalui putusan hakim yang berkeadilan harus dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dengan terakomodirnya hak-hak tersebut dalam putusan hakim dan kemudahan dalam sistem pelaksanaannya (eksekusinya). Lembaga Peradilan harus dapat menjadi benteng keadilan terakhir bagi para pencari keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak yang terabaikan (tidak terpenuhi) pascaperceraian. Selain itu, untuk menjamin hak-hak tersebut dilaksanakan, diperlukan suatu sistem pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari segi waktu, tata cara, maupun biaya.

ABSTRACT

Muhammad Radhia Wardana: *Legal Protection of the Rights of Women and Children After Divorce*, under the guidance of I : Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H., II. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. at Postgraduate State Islamic University Antasari Banjarmasin, 2022.

Keywords: Legal protection, rights of women and children, after divorce

What is quite worrying about the high divorce rate in the Republic of Indonesia is that the rights of women and children after divorce are often neglected. Women and children are a vulnerable group and really need legal protection from the state, because women and children are the parties most often become victims and feel the negative impact of a divorce. In fact, women and children are often in a weak and powerless position, so they cannot fight for and even get their rights which have been neglected due to divorce. Whereas normatively, Islamic law has provided guarantees about the rights of women and children that must be fulfilled after a divorce occurs. On the other hand, legally these rights are also recognized by state law and get guaranteed protection through various laws and regulations in Indonesia. Therefore, the powerlessness of women and children in fighting for their rights due to divorce must be a serious concern in law enforcement in our country. Women and children should get proper protection from the state through instruments and fair law enforcement. The state must be present to protect both of them so that their rights can be fulfilled, especially with regard to their post-divorce rights..

This research is a type of normative legal research, or commonly referred to as library research. The problems that have been formulated in this research will be answered or solved using a statute approach. On the other hand, this research also requires a conceptual approach based on Islamic law, which refers to the concepts and provisions formulated in Islamic law. Sources of data in this study obtained from library materials or literature that has to do with the object of research. The data collection technique (legal material) is done by using documentation. Then the author will examine and analyze all legal provisions on the subject matter according to Islamic law (normatively) and according to legislation (juridically), so that a deductive conclusion can be drawn, namely drawing conclusions from a general problem to concrete problems. faced..

The results of this study conclude that the judiciary as an institution of law enforcement and justice is indispensable and even plays a very important and strategic role to provide legal protection for the rights of women and children after divorce. The role of the judiciary through a fair judge's decision must be able to guarantee the protection of the rights of women and children post-divorce by accommodating these rights in the judge's decision and facilitating the

implementation system (execution). Judicial institutions must be able to become the last bastion of justice for justice seekers to obtain legal protection in fighting for the rights of neglected (unfulfilled) women and children post-divorce. In addition, to ensure that these rights are implemented, a system for implementing court decisions (execution) is needed that can be implemented effectively and efficiently, both in terms of time, procedures, and costs.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai tujuan mulia, baik dalam pandangan agama, masyarakat maupun negara. Dalam pandangan syari'at agama (Islam), perkawinan dipandang bukan sekedar kebutuhan naluriah manusia semata, atau hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis manusia. Lebih dari itu, perkawinan dalam pandangan Islam bahkan bernilai ibadah karena merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dalam syari'at Islam dan melaksanakannya berarti menjalankan sunnah Rasulullah Saw.¹ Selain itu, perkawinan merupakan jalan hidup yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT. kepada umat-umat manusia terdahulu.

Terciptanya suatu hubungan yang sah (halal) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan hanya bisa dicapai dengan melaksanakan perkawinan. Tanpa ikatan perkawinan, hubungan seseorang dengan lawan jenisnya (yang bukan mahram) akan dinilai oleh Allah SWT. sebagai perbuatan dosa dan kemaksiatan.

Sebaliknya, hubungan antara dua lawan jenis yang dilandasi dengan ikatan

¹ Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa melaksanakan perkawinan merupakan ibadah. Meskipun demikian, kebanyakan kitab hadis-hadis hukum dan fiqh memasukkan pembahasan tentang *munakahat* (perkawinan) dalam kitab (bab) muamalah, tidak dalam kitab (bab) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol daripada aspek ibadah, walaupun di dalamnya memang terkandung pula nilai-nilai ibadah yang cukup sakral. Lihat Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 47.